



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RITASARI PUJIASTUTI
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 465319

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.888.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 607 m2/150 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.455.250.000
2. Tanah Seluas 427 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 384.300.000
3. Tanah Seluas 584 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 29.200.000
4. Tanah Seluas 1322 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **243.100.000**

1. MOBIL, VW BEETLE Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SO LO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
5. MOBIL, NISSAN JUKE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **196.100.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.428.214
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.336.378.214
III. HUTANG	Rp.	341.755.181
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.994.623.033

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.